

DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARANGASEM BALI

Arista Aprilia¹, Arik Susbiyani², Elok Fitriah³
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jember
aristaapriliah867@gmail.com

ABSTRACT

The process of exercising state power in carrying out the provision of public goods and services is part of good governance. The Government Agency Performance Report (LAKIP) is considered necessary to determine the ability of each agency to achieve the vision, mission, and objectives of the organization. Performance accountability is a form of performance reporting that must be accounted for by the party entrusted to carry out programs or activities in order to achieve the vision and mission and strategic plan that has been set by the organization. The type of data used in this study is subject data. In conducting this research, data collection techniques were used as follows: questionnaires (Questionnaires) namely distributing a list of questions in the form of questionnaires to respondents. The object of the research that I took was at the Karangasem Bali Marine and Fisheries Service. The results of this study based on several data analyses showed a positive and significant influence. This proves that the better the Budget Implementation will increase the accountability of the performance of the Karangasem Bali Marine and Fisheries Service.

ABSTRAK

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services merupakan bagian dari good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pelaporan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan program atau kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek. Dalam mengadakan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut kuisoner (Angket) Yaitu menyebarkan daftar pertanyaan berupa angket kepada responden. Objek tempat penelitian yang saya ambil yaitu di Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali. Hasil dari penelitian ini berdasarkan beberapa analisis data menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin baik Implementasi Anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali.

Kata kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, good governance

1. PENDAHULUAN

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services merupakan bagian dari good governance. Terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya good governance ditunjukkan dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah yang merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan masalah instansi yang bersangkutan. Penerapan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil. Pembangunan akan kebutuhan masyarakat akan menjadikan landasan berpikir bagaimana mengoperasikan otonomi sehingga betul-betul mencapai sasaran yaitu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat (Adhitama & Aulia, 2017).

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Sebelumnya penerapan anggaran berbasis kinerja telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik (Biduri, 2018).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pelaporan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan program atau kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selain itu instansi juga menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali perlu mendapat dukungan penganggaran yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Penyusunan KUA ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan suatu pedoman dan atau petunjuk untuk kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (RAPBD 2020). Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan, penyusunan KUA 2020 merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali. KUA 2020 disusun dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi dipemerintah yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh (Layuk & Matani, 2019).

2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek. Data subyek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Sugiyono, 2016).

Dalam mengadakan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut kuisioner (Angket) Yaitu menyebarkan daftar pertanyaan berupa angket kepada responden. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner yang digunakan mengacu pada penelitian Sugiyono (2016). Skala yang digunakan untuk menyatakan tanggapan responden yang objeknya adalah muzakki terhadap setiap instrumen pertanyaan yang diberikan adalah dengan menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Provinsi Bali Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mempunyai tugas:

1. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. Penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi

Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Misi

- a. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
- b. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.

Pembahasan

Tabel 1.1 Hasil Uji t

| Variabel | Sig |
|---|-------|
| Perencanaan Anggaran (X_1) | 0,001 |
| Implementasi Anggaran (X_2) | 0,001 |
| Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran (X_3) | 0,019 |
| Evaluasi Kinerja (X_4) | 0,016 |

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besar dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel Perencanaan Anggaran (X_1) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Tingkat probabilitas (α) adalah 0,001. Hal ini berarti Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Karena nilai probabilitas $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H_1 diterima).
2. Pengaruh variabel Implementasi Anggaran (X_2) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Tingkat probabilitas (α) adalah 0,001. Hal ini berarti Implementasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Karena nilai probabilitas $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H_2 diterima).
3. Pengaruh variabel Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran (X_3) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Tingkat probabilitas (α) adalah 0,019. Hal ini berarti Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Karena nilai probabilitas $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H_3 diterima).
4. Pengaruh variabel Evaluasi Kinerja (X_4) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Tingkat probabilitas (α) adalah 0,016. Hal ini berarti Evaluasi Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Karena nilai probabilitas $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H_4 diterima).

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis pertama (H_1) dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,001. Pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif signifikan, artinya semakin tinggi Perencanaan Anggaran maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja (H_1 diterima).

Anggaran yang efektif dan berorientasi pada kinerja akan dapat membentuk perencanaan yang tepat. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006:275). Penelitian Adhitama & Aulia (2017), menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda secara umum dikatakan cukup baik. Penelitian Sugeha (2018) menunjukkan bahwa Kinerja pendapatan dari Pemerintah Kota Tomohon cukup baik, yang dapat dilihat dari realisasi pendapatan tahun 2012 dan 2013 sudah melebihi target. Penelitian Layuk & Matani, (2019), menunjukkan bahwa Pola hubungan kemandirian daerah ada pada kriteria instruktif. Dalam model hubungan Instruktif,

peran Pemerintah Pusat lebih menonjol terhadap kemandirian Pemerintah Daerah dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada pendanaan dari Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratama&Handoko, 2018) menunjukkan bahwa seluruh aktivitas anggaran berbasis kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk peningkatan kinerja di seluruh instansi yang ada kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai telah sesuai atau berjalan dengan baik. Penelitian (Ferniyanti et al, 2019) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan pelaksanaan dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian (Winara & Putri, 2019) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian (Hermanto, 2020) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penelitian (Sunarya, 2021) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

Pengaruh Implementasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis kedua (H₂) dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa Implementasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,001, artinya semakin tinggi Implementasi Anggaran maka Akuntabilitas Kinerja tidak mengalami perubahan (H₂ diterima).

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer

Penelitian (Febiani et al., 2017), (Ririh Dian Pratiwi & Setyowati, 2017), (Pratama&Handoko, 2018) menunjukkan bahwa seluruh aktivitas anggaran berbasis kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk peningkatan kinerja di seluruh instansi yang ada kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai telah sesuai atau berjalan dengan baik. Penelitian (Ferniyanti et al, 2019) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan pelaksanaan dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian (Winara & Putri, 2019) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian (Hermanto, 2020) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penelitian (Sunarya, 2021) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

Pengaruh Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis ketiga (H3) dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,019. Pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif signifikan, artinya semakin tinggi Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja (H₃ diterima).

Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran merupakan kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut. Adapun faktor-faktor mempengaruhi Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran adalah personal, situasional dan posisi (Miftahullail, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama&Handoko, (2018) menunjukkan bahwa seluruh aktivitas anggaran berbasis kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk peningkatan kinerja di seluruh instansi yang ada kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai telah sesuai atau berjalan dengan baik. Penelitian (Ferniyanti et al, 2019) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan pelaksanaan dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian (Winara & Putri, 2019) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian (Hermanto, 2020) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penelitian (Sunarya, 2021) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

Pengaruh Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis keempat (H4) dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,016. Pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif signifikan, artinya semakin tinggi Evaluasi Kinerja maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja (H₄ diterima).

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang (Bastian, 2010:329). Evaluasi Kinerja menurut UU No. 20 tahun 2003 pengertian Evaluasi Kinerja adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan Negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Orang yang berEvaluasi Kinerja akan lebih rasional dalam berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggungjawab dengan baik. Dimilikinya Evaluasi Kinerja formal yang memadai dengan latar belakang akuntansi untuk staf bagian akuntansi akan memudahkan staf dalam menjalani rutinitas pekerjaan. Staf akuntansi yang memiliki Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja yang relevan dengan pekerjaannya akan memiliki kemampuan yang tercermin dari hasil pekerjaannya (Miftahullail, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama&Handoko, (2018) menunjukkan bahwa seluruh aktivitas anggaran berbasis kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk peningkatan kinerja di seluruh instansi yang ada kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai telah sesuai atau berjalan dengan bai. Penelitian (Ferniyanti et al, 2019) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan pelaksanaa dan pelaporan anggaran sera evaluasi kinerja berpengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian (Winara & Putri, 2019) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian (Hermanto, 2020) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penelitian (Sunarya, 2021) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin baik Perencanaan Anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali. 2) Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh Implementasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin baik Implementasi Anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali. 3) Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Ini membuktikan bahwa Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran yang tinggi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali. 4) Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Ini membuktikan bahwa Evaluasi Kinerja yang tinggi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Karangasem Bali.

Saran

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya kuisisioner yang disebar menggunakan teknologi melalui kuisisioner dengan *link.bit.ly* agar lebih efisien waktu dan *paperless*. Diharapkan pada penelitian selanjutnya sebaiknya kuisisioner yang disebar dikemas yang menarik agar responden semakin berpartisipasi dalam mengisi kuisisioner penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitama, S., & Aulia, D. R. R. (2017). ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DENGAN MODEL FOUR LEVERS OF CONTROL DI PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI. *INFO ARTHA*.
<https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.16>

Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. In *Akuntansi Sektor Publik*.

Febiani, I., Irianto, G., & Purwanti, L. (2017). DETERMINAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.22219/jrak.v6i1.5079>

Layuk, P. K. A., & Matani, C. D. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah*.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian. In *Sugiyono*.

